

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Terhadap Pencapaian SDGs 4 Berdasarkan Model Evaluasi Kebijakan Dunn

Annisa Rahma Ariyani¹, Aghnia Rohmatul Aulia², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674138@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674147@mhs.unesa.ac.id², indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 08 Mei 2026

Revised: 22 Juni 2026

Accepted: 08 Juli 2026

Keywords: *Evaluasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka, SDGs 4.*

Abstract: *Satu di antara unsur kunci dalam mewujudkan arah pembangunan global yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ialah pendidikan. Hal ini telah diatur melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terkait dengan peran dari Sistem Pendidikan Nasional. Kemampuan sistem pendidikan di Indonesia dalam memenuhi tuntutan zaman masih mengalami tantangan besar. Maka dari itu, studi ini ditujukan guna mengkaji evaluasi kebijakan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan model pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hal ini, guna menentukan potensinya dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggali sumber data atau informasi melalui studi dokumentasi dan literatur. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun pelaksanaan Kurikulum Merdeka dinilai dapat memajukan mutu pendidikan di Indonesia, tetapi masih banyak terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Melalui teori yang dipaparkan oleh William N. Dunn, dalam 6 aspek yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan, masing-masing aspek tersebut masih terdapat tantangan yang menyebabkan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Tantangan utamanya terdapat pada keterbatasan fasilitas dan kompetensi sumber daya manusia yang tersedia, sehingga diperlukan upaya mendukung untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan satu di antara aspek krusial guna mencapai tujuan pembangunan global berkelanjutan atau lazim dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk

watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merancang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs yang telah ditetapkan oleh United Nations pada tahun 2015. Dalam SDGs tersebut, terdapat 17 tujuan utama yang saling berkaitan, satu di antaranya ialah SDGs 4. Sebagaimana termuat dalam SDGS 4 yang menyatakan bahwa pendidikan berkualitas berperan guna “menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.” Di samping itu, SDGs 4 juga tidak hanya menekankan peningkatan akses pendidikan, tetapi juga kualitas proses pembelajaran, penguatan, kompetensi peserta didik, dan pemerataan mutu pendidikan antarwilayah. Dengan demikian, dalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan dapat menghadapi permasalahan global diperlukan suatu pondasi, yakni pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan juga memerlukan kebijakan yang mampu mengarahkan proses pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan pendidikan yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.

Salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah kurikulum. Secara umum, kurikulum merupakan sistem perencanaan yang digunakan sebagai pedoman atau panduan pelaksanaan pendidikan sekaligus arah kebijakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum juga menyediakan proses pembelajaran yang akan diperoleh peserta didik selama pelaksanaan pendidikan, sehingga kurikulum tidak hanya berbentuk dokumen perencanaan, tetapi juga tercermin dalam sejumlah mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dijalankan di kelas. Seiring dengan perkembangan global, kurikulum tidak hanya berfokus pada pembelajaran pengetahuan, tetapi juga perlu menekankan pembelajaran ekologis, antarbudaya, dan interdisipliner yang mampu mendukung peserta didik untuk berpikir kritis dan adaptif (UNESCO, 2021). Penyusunan kurikulum harus diselaraskan oleh kondisi dan kapasitas dari masing-masing tingkat pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, pengembangan kurikulum juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, perubahan kurikulum menjadi hal wajar dalam sistem pendidikan sebagai upaya menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.

Di Indonesia telah mengalami beberapa pergantian kurikulum dari tahun 1947 hingga sekarang sebagai bagian dari upaya penyesuaian sistem pendidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan kurikulum tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem pembelajaran saja, tetapi juga meningkatkan mutu sumber daya manusia supaya dapat bersaing di tingkat global. Dalam perkembangannya, salah satu perubahan kurikulum yang cukup signifikan terjadi pada perubahan dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada peserta didik dan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah untuk memajukan potensi peserta didik agar lebih mandiri, inovatif, dan kreatif. Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa pergantian kurikulum ini dapat memperbaiki kualitas pendidikan agar mampu berdaya saing dengan negara lain (Sulistyowati & Radiana, 2024).

Namun, pada faktanya implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia masih mengalami tantangan besar dalam pelaksanaannya untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi (Aspi & Syahrani, 2022). Ketidakmampuan sistem pendidikan dalam memenuhi tuntutan zaman tersebut juga dipengaruhi oleh dinamika kepemimpinan dalam sektor pendidikan. Pergantian dinamika kepemimpinan dalam sektor pendidikan kerap diikuti dengan adanya perubahan arah kebijakan,

termasuk kebijakan kurikulum, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan, sehingga pelaksanaan kurikulum seringkali memerlukan proses penyesuaian yang berulang bagi pendidik maupun peserta didik. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyusun dan memastikan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan, serta sistem evaluasi yang komprehensif agar perubahan kurikulum tetap terarah dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana evaluasi kebijakan kurikulum di Indonesia, khususnya Kurikulum Merdeka dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perubahan kebijakan kurikulum dari Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari dinamika reformasi pendidikan nasional. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Untuk menganalisis kebijakan tersebut, penelitian ini menerapkan model pendekatan evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan dapat ditinjau melalui enam aspek, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menyajikan data yang berisi terkait dengan gambaran suatu fenomena melalui kata-kata yang diperoleh dari perilaku yang diamati. Menurut Abdussamad (2021) penelitian kualitatif berorientasi pada fenomena yang bersifat alami. Adapun jenis penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Ramdhan (2021) ialah metode untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu fenomena yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah, seperti jurnal, buku, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan pendidikan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya (Muspawi & Sulung, 2024). Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dengan kebijakan Kurikulum Merdeka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan Kurikulum Merdeka. Studi dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen tertulis guna memperkuat hasil penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi artikel, jurnal, laporan penelitian, dan regulasi pendidikan. Analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi konsep kebijakan, tujuan pendidikan, dan berbagai tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kurikulum

Dalam sejarah tercatat bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan ataupun perkembangan dalam hal kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia bertujuan sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang telah dilaksanakan. Selain itu, perkembangan kurikulum muncul sebagai bentuk perancangan dan respons terhadap tuntutan dan kemajuan pendidikan seiring dengan perkembangan zaman (Paramita et al., 2025). Perubahan kurikulum ini terjadi sebanyak 11 kali, sejak tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2022 (Setiyorini & Setiawan, 2023).

Pergantian kurikulum ditujukan untuk mempermudah proses pendidikan selaras dengan perkembangan zaman. Namun, pada kenyataannya perubahan ini seringkali menimbulkan kebingungan di berbagai pihak sehingga proses pendidikan seringkali terhambat dan juga memunculkan opini di masyarakat terkait dengan “ganti menteri, ganti kurikulum”. Faktanya, menurut Insani (2019), pergantian kurikulum dilakukan sebab dipengaruhi oleh perubahan undang-undang dalam sistem pendidikan nasional.

Sebelum diterapkan Kurikulum Merdeka, Indonesia telah menggunakan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional. Kurikulum 2013 lebih berfokus pada pendidikan karakter dan pengembangan kompetensi pengetahuan serta keterampilan secara menyeluruh. Namun, dalam penerapannya, kurikulum ini sangat bergantung pada pemerintah pusat sehingga sekolah dan guru kurang dilibatkan dalam pembuatan kurikulum. Akibatnya, guru kurang memahami konsep dari Kurikulum 2013 karena kurikulum ini terlalu berfokus pada pembelajaran yang aktif dan mandiri serta materi yang harus dipelajari juga melampaui batas normal. Dengan demikian, pemerintah mengembangkan kurikulum kembali dengan menghadirkan Kurikulum Merdeka sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi pokok, serta peningkatan kompetensi dan karakter siswa.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merilis Kurikulum Merdeka sebagai perkembangan kurikulum baru di Indonesia. Kurikulum ini mulai diterapkan secara terbatas di beberapa sekolah (sekolah penggerak) sejak tahun 2021 dan telah diresmikan pada Februari 2022. Berdasarkan evaluasi dari penerapan Kurikulum 2013, maka dirancang Kurikulum Merdeka dengan harapan dapat memberikan keleluasaan lebih untuk satuan pendidikan dalam melaksanakan dan memperkecil beban materi. Namun, tetap melanjutkan hal-hal positif dari kurikulum sebelumnya (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan [BSKAP], 2024). Kurikulum ini memberikan kebebasan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di masing-masing wilayah, sehingga pembelajaran akan lebih relevan dan bermakna.

Salah satu keunggulan utama Kurikulum Merdeka adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Proyek ini bertujuan mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik secara holistik dengan mengintegrasikan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran lintas mata pelajaran. Pada tahun 2024, BSKAP menyebutkan “enam dimensi Profil Pelajar Pancasila tersebut yaitu (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) Bergotong Royong, (3) Bernalar Kritis, (4) Berkebinekaan global, (5) Mandiri, dan (6) Kreatif.”

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga berfokus terhadap pembelajaran yang berdasarkan pada peserta didik (*student-centered learning*), yakni guru berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong peserta didik untuk aktif menemukan, membangun, dan mengaplikasikan pengetahuannya sendiri. Hal ini dilakukan dengan pengalaman belajar langsung yang terhubung dengan minat dan pengetahuan sebelumnya, sehingga strategi yang digunakan melibatkan aktivitas inkuiri, diskusi terbuka, tugas kolaboratif, dan pemecahan masalah nyata yang mendorong cara berpikir dan kemampuan analitis peserta didik (BSKAP, 2024).

Dalam pelaksanaannya, Kurikulum Merdeka menempuh beberapa fase penerapan secara bertahap, pada fase awal kurikulum ini diperuntukkan bagi sekolah penggerak sebelum kemudian diperluas secara nasional. Pada tahun 2022/2023, sekolah negeri diberikan keleluasaan untuk memilih menerapkan Kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan otonomi yang mereka miliki, sementara untuk sekolah swasta memerlukan persetujuan dari pihak yayasan untuk keputusan

tersebut. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan pada tahun ajaran 2023/2024 dengan tetap memberikan fleksibilitas yang sama bagi satuan pendidikan untuk menentukan kesiapannya masing-masing. Pada saat telah diputuskan sebagai kurikulum nasional, pelaksanaan Kurikulum Merdeka juga tetap memberikan keleluasaan untuk sekolah yang belum siap hingga tahun ajaran 2025/2026. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting untuk mendukung dan memfasilitasi keputusan yang telah diambil oleh masing-masing satuan pendidikan dalam proses transisi kurikulum ini (BSKAP, 2024).

Namun demikian, penerapan Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kesiapan guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan mengimplementasikan konsep Kurikulum Merdeka masih menjadi tantangan utama, khususnya pada daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pelatihan dan sumber daya pendidikan (Putri & Maula, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya mengandalkan desain kebijakan, tetapi juga pada kesiapan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Menurut Model Teori Dunn

Analisis kebijakan Kurikulum Merdeka dapat dilakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yakni dengan “enam aspek evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.” Keenam aspek tersebut digunakan sebagai kerangka analisis yang sistematis untuk menilai potensi Kurikulum Merdeka dalam mencapai tujuan kebijakan pendidikan nasional dan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 4. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan untuk mencapai tujuan, sedangkan efisiensi menilai perbandingan antara hasil dan sumber daya yang dimanfaatkan. Kecukupan menilai kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah, sementara pemerataan menilai apakah manfaat kebijakan terdistribusi secara menyeluruh kepada masyarakat. Adapun responsivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ketepatan menilai kesesuaian kebijakan terhadap nilai, konteks, dan permasalahan yang dihadapi (Nadila, 2023).

Dari aspek efektivitas, Kurikulum Merdeka dinilai mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar peserta didik, sehingga menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan student-centered learning menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, dan guru berperan sebagai fasilitator yang menyesuaikan metode dan modul pembelajaran berdasarkan karakteristik, gaya belajar, kebutuhan masing-masing peserta didik. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih mudah melakukan asesmen diagnostik dan mendorong peserta didik untuk lebih aktif, kreatif, dan berkembang sesuai potensinya, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan prestasi belajar (Iqbal et al., 2024). Namun demikian, efektivitas implementasinya belum berjalan sepenuhnya secara optimal karena masih terdapat guru yang belum memahami konsep kurikulum secara menyeluruh dan cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional.

Dari aspek efisiensi, implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendidikan, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, kurikulum ini dirancang untuk menyederhanakan struktur pembelajaran dengan menekankan pada kompetensi esensial, sehingga waktu belajar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Selain itu, penyesuaian metode pembelajaran yang diberikan berdasarkan kebutuhan peserta didik berpotensi meningkatkan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Di sisi lain, implementasi kebijakan ini masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, serta kesiapan tenaga pendidik yang belum merata. Beban kerja guru yang meningkat

dalam hal penyesuaian perangkat ajar dapat memengaruhi efektivitas penggunaan waktu dan tenaga (Khotimah et al., 2025). Dalam rangka meningkatkan efisiensi, pemerintah telah meluncurkan platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana pelatihan guru yang dapat diakses secara daring, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pelatihan tatap muka yang memerlukan biaya lebih besar.

Dari aspek kecukupan, Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang tidak mampu diselesaikan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013. Namun, dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Keterbatasan sarana prasarana dan kesiapan tenaga pendidik yang belum merata menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya cukup dalam menjawab permasalahan pendidikan yang ada (Khotimah et al., 2025). Untuk itu, dibutuhkan upaya lanjutan yang lebih menyeluruh agar Kurikulum Merdeka dapat memberikan solusi yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari aspek pemerataan, penerapan Kurikulum Merdeka masih menghadapi tantangan pemerataan yang cukup serius, terutama dalam distribusi sumber daya dan kesiapan antarwilayah. Ketimpangan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia antardaerah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan utama dalam penerapan kurikulum ini. Banyak sekolah di wilayah terpencil yang belum mempunyai fasilitas dan akses teknologi yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang inovatif sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Selain itu, akses terhadap pelatihan guru juga belum merata, sehingga memengaruhi kesiapan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum secara optimal (Sulistiyowati & Radiana, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa manfaat Kurikulum Merdeka belum dirasakan secara merata oleh seluruh satuan pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah.

Dari aspek responsivitas, Kurikulum Merdeka menunjukkan upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan satuan pendidikan melalui berbagai bentuk dukungan kebijakan. Hal ini terlihat dari adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif melalui webinar untuk meningkatkan pemahaman satuan pendidikan terkait implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti PMM yang memungkinkan guru dan kepala sekolah untuk saling belajar dan berbagi praktik baik. Penguatan komunitas belajar, penyediaan narasumber berbagi praktik baik (NSBPB), dan layanan bantuan (*helpdesk*) juga menjadi bentuk respons terhadap kebutuhan pendampingan dalam implementasi kurikulum (BSKAP, 2024). Upaya ini menunjukkan bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka dirancang secara responsif untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka memiliki tingkat responsivitas yang cukup baik dalam mendukung implementasi kebijakan di lapangan.

Dari aspek ketepatan, Kurikulum Merdeka dinilai memiliki relevansi yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai implikasi positif yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik, sehingga mereka bebas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki (Suparlan, 2020, sebagaimana dikutip dalam Khotimah et al., 2025). Selain itu, fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti “kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah” menunjukkan bahwa kurikulum ini selaras dengan perkembangan sistem pendidikan modern (Iswahyudi et al., 2021, sebagaimana dikutip dalam Khotimah et al., 2025). Kurikulum Merdeka juga memberikan ruang bagi tenaga pendidik untuk mengembangkan strategi

pembelajaran yang lebih inovatif dan kontekstual, sehingga berdampak bagi peningkatan kualitas pendidikan (Sujarwanto, 2021, sebagaimana dikutip dalam Khotimah et al., 2025). Untuk memastikan ketepatan implementasinya, Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci agar kurikulum ini dapat diterapkan secara optimal dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan (Sulistiyowati & Radiana, 2024).

Hambatan Penerapan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka menghadapi beberapa tantangan yang perlu mendapatkan penyelesaian serius dalam penerapannya. Hambatan atau tantangan tersebut terdiri atas, fasilitas dan media pembelajaran yang terbatas, sehingga menghambat pengimplementasian Kurikulum Merdeka. Selain itu, kesiapan guru dan penggunaan teknologi digital yang kurang memadai. Di Indonesia masih terdapat ketimpangan digital antara sekolah di perkotaan dengan pedesaan sehingga hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kebijakan pemerintah yang inkonsisten juga menghambat dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta meningkatkan akses digital di seluruh wilayah dan kesiapan guru, siswa, dan orang tua dalam mengoptimalkan penerapan Kurikulum Merdeka.

Pengoptimalan penerapan Kurikulum Merdeka dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada guru, termasuk mengembangkan media pembelajaran, teknologi digital, serta menciptakan strategi evaluasi kebijakan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam penerapannya diperlukan kolaborasi antara peran pemerintah, orang tua, guru, dan juga siswa dalam menciptakan pembelajaran Kurikulum Merdeka secara efektif. Pemerintah berperan untuk memastikan ketersediaan media pembelajaran yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, orang tua dan guru juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan potensi siswa. Dengan demikian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka adalah hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang lebih berfokus pada pendidikan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek dan peningkatan kompetensi pada materi yang esensial sesuai dengan kebutuhan siswa di masing-masing wilayah. Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka dinilai mampu untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik sebab Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan student-centered. Hal ini tentu dapat berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, penerapannya belum terlaksana secara optimal karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana di tiap-tiap daerah. Selain itu, kompetensi sumber daya yang tersedia juga masih terbatas, terutama bagi tenaga kependidikan yang masih belum sepenuhnya memahami konsep kurikulum sehingga masih perlu upaya lanjutan untuk mengoptimalkan kebijakan Kurikulum Merdeka agar kurikulum ini mampu memperbaiki kualitas pendidikan nasional dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2024). Kajian akademik Kurikulum

-
- Merdeka. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Insani, F.D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, 8 (1), 43-64.
- Iqbal, M., Sari, D. P., Rahmawati, F., & Hidayat, T. (2024). Analisis Evaluasi Program Pendidikan Kurikulum Merdeka Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTTP)*, 1(4), 715-723.
- Khoirurrijal, K., Fadriati, F., Sofia, S., Musyafa, A. D., Sunaryo, G., Maksum, A., & Suprapno, S. (2022). Pengembangan Kurikulum Merdeka. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Khotimah, S. N., Nurfaiza, A., & Sukiman, S. (2025). Inovasi Kurikulum Merdeka di sekolah: Tantangan, dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran*, 19(1), 190–202.
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dengan Menggunakan Model William Dunn. *JPSS: Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107-113.
- Paramita, E., Aminullah, A., Ratnasari, D., & Husna, A. (2025). Transformasi Perkembangan Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5 (1), 169–184.
- Putri, Z. F., & Maula, N. (2024). Studi literatur: Transformasi kurikulum Indonesia 1947 sampai Kurikulum Merdeka dilihat dari perspektif model kurikulum. *Jurnal Teknodik*, 28(1), 77-93.
- Ramadhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Sarrayu, A. E., Purwoko, B., & Hazin, M. (2025). Analisis Tahapan Proses Kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia Berdasarkan Model William Dunn. *JIEP: Journal of Islamic Education Policy*, 10(1), 1–12.
- Setiyorini, SR, & Setiawan, D. (2023). Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1 (1), 12.
- Sulistiyowati, C., & Radiana, U. (2024). Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Penerapan Kurikulum Merdeka untuk Mencapai Tujuan Sustainable Development Goal. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 12706-12712.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116.
- Suseno, & Chanifudin. (2025). Kurikulum 2013 Vs Kurikulum Merdeka Kelebihan dan Kekurangannya. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(4), 178-182.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Jakarta: Sekretariat Negara.
- UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education.